

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu Covid-19 menular antar manusia dengan cepat dan menyebar keseluruh negara, termasuk indonesia dalam beberapa bulan. Penyebaran virus tersebut dapat mewabah secara luas ke seluruh dunia. Hal ini disebabkan tingkat mobilitas dari masyarakat dunia yang melakukan perjalanan lintas negara dengan berbagai kepentingan. Covid-19 telah mengubah kehidupan sosial dan pola interaksi masyarakat pada lingkungan kota dan pedesaan yang kemudian memaksa pemerintah daerah membuat kebijakan secara darurat seperti berupa himbauan menjaga jarak saat berinteraksi sosial (*social distancing*), membentuk relawan pada setiap wilayah dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Selanjutnya, hal yang ditimbulkan dari mewabahnya virus covid-19 adalah hampir semua kegiatan dilakukan dari rumah (*work from home*) untuk sektor pemerintahan dan perkantoran, pada sektor pendidikan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh (*daring*) yang dilakukan dari rumah masing-masing. Pada sektor pemerintahan, dimana setiap kantor pemerintahan mengalami pengurangan pegawai pada jam kerja, sebagian pegawai melakukan pekerjaan dari rumah, begitu juga dengan sektor industri lainnya, sektor pariwisata mengalami dampak cukup besar karena adanya pengurangan dan pembatasan kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik ataupun internasional.

Dalam rangka memutus mata rantai covid-19, muncul beberapa kebijakan pemerintah, seperti Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tujuannya adalah mengurangi interaksi antar masyarakat sehingga dapat mengurangi penyebaran Covid-19. Akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan pemberlakuan

pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti masyarakat yang pekerjaannya mengharuskan untuk berinteraksi dengan orang banyak terpaksa harus tutup, bahkan tidak sedikit yang mengalami masalah ekonomi akibat dari pandemi covid-19. Akibatnya perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil dan berdampak terhadap perekonomian negara yang semakin menurun.

Kebijakan PSBB dan PPKM belum mampu mengendalikan jumlah persebaran kasus covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah kasus covid-19 yang terus bertambah setiap harinya. Analisis sementara bahwa masyarakat indonesia pada umumnya masih belum paham bahkan acuh terhadap bahayanya covid-19. Disisi lain tentunya ada faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat terpaksa tetapberaktivitas di luar rumah. Melihat situasi ini percepatan penanganan covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak termasuk perguruan tinggi, peran perguruan tinggi dapat di jadikan ujung tombak dalam peranannya dalam mensosialisasikan penanganan covid-19 kepada masyarakat.

Pemerintah juga berupaya dalam menyiapkan bantuan berupa bantuan sosial yang akan ditujukan kepada masyarakat. Pemberian bantuan tersebut bertujuan agar dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menerbitkan bantuan sosial bagi masyarakat dengan nama program Bantuan Langsung Tunai (BLT), selanjutnya pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial dengan nama program Perlindungan Sosial. Kedua kebijakan yang pernah dikeluarkan dalam masa kepemimpinannya memiliki tujuan dan maksud yang sama, yaitu mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat. Bantuan sosial (Bansos) mendapat banyak perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang terdampak covid-19.

Penyaluran bantuan sosisal (bansos) merupakan otoritas administratif masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda). Namun berakibat terjadinya ketidak

seragaman pedoman yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial pada setiap daerah. Diduga ini dipengaruhi oleh masing-masing pemerintah daerah. Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terdapat pengungkapan belanja bantuan sosial tetapi ada beberapa penelitian yang menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan menerapkan kebijakan, kinerja ataupun tingkat pengungkapan secara umum. Pemerintah daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan daerah setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang berhak menerima bantuan sosial adalah masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil dari krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, agar yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Bantuan sosial dapat diberikan kepada lembaga Non Pemerintahan yang bergerak pada bidang pendidikan, keagamaan dan bidang-bidang lainnya yang berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kriteria penerima bantuan sosial adalah mereka yang berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta memiliki identitas yang jelas. Tujuan bantuan sosial di anggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia no 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak covid-19, memutuskan:

- a. Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak covid-19
- b. Penanggungjawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dalam dikum kesatu dilaksanakan oleh Direktur Jendral perlindungan jaminan sosial kementrian sosoal
- c. Penanggungjawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaksanakan oleh Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin

- d. Bantuan sosial sembako dilaksanakan diwilayah, meliputi: Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Tangerang, dan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi. Dan seterusnya.

Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 34 tahun 2016 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat, yang kini telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada masa pandemi covid-19 bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah bermacam-macam, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Jenis Bantuan

No	Jenis Bantuan Sosial
1	Bantuan Sembako
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)
3	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
4	Subsidi Listrik
5	Kartu Pekerja
6	Subsidi Gaji Karyawan
7	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil

Sumber: Kompas.com (Diakses pada 9 juli 2022)

Bantuan sosial yang dikaji dalam penelitian ini ialah bantuan sosial langsung tunai (BLT). Program ini diluncurkan sejak awal kasus covid-19 muncul di Indonesia. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp. 600.000 selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni. Dalam perjalanannya program ini diperpanjang sampai Desember, namun nilai uang tunai yang diterima berkurang menjadi Rp.300.000. bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang

terdampak covid-19, baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan, data pengusulan kemudian diverifikasi oleh Tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemi covid-19, sehingga tidak terjadi data ganda. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT Pos Indonesia.

Kriteria Penerima bantuan sosial Kemensos Penerima adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penerima Bansos pada Kabupaten Bekasi berjumlah 442.782 terbagi dalam 23 kecamatan. Pada kecamatan Sukawangi penerima bantuan sosial berjumlah 16.356, terbagi dalam 7 Desa. Desa tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Desa dan penerima bansos tahun 2020

No	Nama Desa	Jumlah Penerima
1	Sukabudi	1.895
2	Sukadaya	1.970
3	Sukakerta	2.296
4	Sukamekar	2.766
5	Sukaringin	1.806
6	Sukatenang	4.095
7	Sukawangi	1.528
TOTAL		16.356

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi (2020)

Desa Sukabudi berjumlah 1.895 penerima, Desa Sukadaya berjumlah 1.970 penerima, Desa Sukakerta berjumlah 2.296 penerima, Desa Sukamekar berjumlah 2.766 penerima, Desa Sukaringin berjumlah 1.806 penerima, Desa Sukatenang berjumlah 4.095 penerima, Desa Sukawangi berjumlah 1.528 penerima.

Berdasarkan hasil survei awal pelaksanaan Bantuan Sosial di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten bekasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan objek kajian penelitian, sebagai berikut:

1. Masih minimnya sosialisasi pemberian bantuan sosial pada masa pandemi covid-19. Akibatnya banyak masyarakat yang belum paham mekanisme bantuan sosial. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh bapak Tatang (Sekretaris di Desa Sukabudi pada tanggal 11 juli 2022) “Kami sudah memerintahkan pihak RT/RW untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal bansos ini dari rumah ke rumah, tetapi masih ada saja masyarakat yang mengaku belum mendapat info tentang bansos tersebut, yaa mungkin ada yang kelewat pas RT/RW nya keliling”.
2. Pendataan data keluarga miskin masih belum optimal. Hal ini menyebabkan masih banyak penduduk/keluarga miskin yang belum terdaftar dalam data terpadu keluarga sejahtera (DTKS). Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Jamhari (Ketua RW di Desa Sukabudi) pada tanggal 11 juli 2022 “Pendataan dilakukan langsung dari rumah ke rumah supaya semuanya dapat bantuan tapi tetap duluin yang miskin, kadang datanya udah saya ajukan tapi pas waktunya pemberian dana masih belum masuk daftar penerima bantuan”.
3. Akibat dari pendataan yang tidak optimal, mengakibatkan pemberian bantuan sosial pada masyarakat/keluarga miskin belum merata. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat menurut bapak Irwan Ruswandi (Kepala urusan Ekonomi di Desa Sukabudi) pada tanggal 11 juli 2022 “sebetulnya pendataan dari kami sudah cukup optimal hanya saja data yang dipake pemerintah itu data lama, bukan data terbaru jadi kebanyakan yang dapet bansos itu msyarakat yang sudah dari dulu masuk daftar masyarakat miskin sekarang masih dapet bansos ya walaupun udah ga miskin lagi”.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19 Pada Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19 Pada Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19 Pada Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi
3. Strategi apakah yang dilakukan Aparat Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19 Pada Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penghambat dalam Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19 di Desa Sukabudi.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19 di Desa Sukabudi.

1.4 Signifikasi Penelitian

1.4.1 Signifikasi Akademik

Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, saran dan keluhan perihal bantuan sosial bagi keluarga yang terdampak covid-19 dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19. Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang di ambil peneliti tentang “Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19 Pada Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini diharapkan berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi bagi peneliti.

Peneliti penemuan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Peran Aparat Desa dalam Implementasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Wildan Ramansyah et al. (2020) yang berjudul “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia”, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai peta permasalahan dan penyebab utama dari berbagai carut marut permasalahan program bantuan sosial pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19. Permasalahan peyaluran bantuan sosial yang terjadi antara lain yaitu masalah alokasi anggaran ditiap kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial tersebut.
2. Syaron Brigitte Lantaeda et al. (2017) yang berjudul “Peran Badan Perencanaan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) di Kota Tomohon. hasil penelitian yang dilakukan

menunjukkan bahwa Peran Badan Perencanaan Pembangunan (Kota Tomohon. Hal ini dapat dilihat dari indikator peran yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bappeda itu sendiri, mekanisme yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Sub-Nasional dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan.

3. Steffy Adelia Tindi (2015) yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa Pineleng Dua telah berperan utama dalam perencanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat desa diberikan kekuasaan oleh Negara melalui UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah untuk memenuhi kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat desa sendiri.
4. Deybi Debora Palit et al. (2022) yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Dan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak covid-19 Di Desa Kasar Kecamatan Kuditan”, penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang program bantuan keuangan dan kebutuhan pokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendanaan dan bantuan sembako di Kaasar Desa, Kecamatan Kauditan berdasarkan teori kebijakan David C. Korten kurang tepat karena elemen kelompok sasaran belum berjalan dengan baik. Masih ada orang yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan, dan masih terdapat keterlambatan dalam penyaluran bantuan, dan tidak semua masyarakat tidak mampu mendapatkan pendampingan.
5. Andriyana dan Vishnu Jowono (2021) yang berjudul “Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menggunakan Perspektif *Multilevel Governance*”, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 menggunakan perspektif *Multilevel Governance* (MLG).

menunjukkan, pemerintah pusat harus memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dengan didukung pemberian anggaran supaya kebijakan sosial dapat berjalan lebih optimal. Yurisdiksi perlu ditetapkan secara jelas dalam regulasi agar setiap instansi dapat berjalan sesuai dengan koridor wewenangnya serta tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Partisipasi pemerintah di tingkat bawah, lembaga nonpemerintah, maupun masyarakat umum dibutuhkan untuk memastikan kebijakan sosial benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.

6. Ahmad Fathoe Coer et al. (2020) yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat Selama Masa Pandemi Covid-19”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan rakyat selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian tersebut yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah bahwa dalam menjamin kesejahteraan rakyat selama masa pandemic Covid-19, Pemerintah daerah perlu memastikan dan memantau dalam setiap bantuan sosial yang diberikan agar proses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
7. Aji Dwi Utomo et al. (2020) yang berjudul “Peran Serta Program Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Untuk Perbaikan Ekonomi Di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”, penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan daya beli masyarakat meningkat di masa pandemic covid-19. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang program Bantuan Sosial Tunai dalam Ekonomi di kecamatan Sumobito - Jombang sangat baik karena di dukung oleh pelayanan yang maksimal dari pihak kecamatan dengan mendata secara menyeluruh, meskipun ada yang belum di data namun setelah mengajukan karna terlewat dengan mudah pihak kecamatan memasukan ke daftar penerima bantuan sosial.
8. Imanuel N. Tadanugi (2019) yang berjudul “Peranan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro, sedangkan lokasi

penelitian ini adalah Kantor Desa Tampemadoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk masyarakat cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa tanggapan informan. Dalam tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat berjalan baik, sedangkan pemberdayaan masyarakat juga dapat berjalan baik, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berjalan baik, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum juga berjalan baik, dan terakhir pembinaan lembaga kemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan baik.

9. Binsan Pandapotan Hasibuan et al. (2022) yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran serta Pemerintah Kota Medan dalam menyalurkan Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan Peran Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam Penanganan Bantuan Sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana Pandemi Covid-19 ini. Hendaknya kedepan dalam mengambil kriteria-kriteria penerima manfaat Bantuan Sosial ini harus lebih selektif lagi, agar tidak terjadi kecemburuan di tengah masyarakat. Dukungan semua masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 agar segera berakhir sangat perlu seperti menjaga pola hidup 5 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas) Demikian yang dapat penulis simpulkan dalam rangka penyusunan Jurnal Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial COVID-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020.
10. Roy Marado (2021) yang berjudul “Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Dki Jakarta”, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di DKI Jakarta, Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bansos COVID-19 cukup baik, namun belum menjangkau seluruh penerima manfaat. Ada permasalahan terkait data penerima manfaat dan rendahnya kualitas bahan

sembako. Faktor pendukung penyaluran bansos COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan masyarakat rentan adalah kerjasama yang dilakukan pejabat pelaksana dengan berbagai instansi lain. Dukungan publik merupakan semangat dari masyarakat dan komitmen dari pejabat pelaksana.

Berdasarkan uraian peneliatian terdahulu di atas, maka dapat dijabarkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti dilihat dari aspek keterbaruan dan *state of the art* dalam penelitian ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19 pada Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.
2. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif dan Kualitatif, dengan menggunakan Kuesioner dan Wawancara mendalam (*Indepht-interview*), dengan Kesetaraan Pedoman Wawancara (*Interview Guide*).
3. Sasaran penelitian, meliputi Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat.

1.4.2 Signifikasi Praktis

Signifikasi praktis penelitian ini, adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik acuan pemberian bantuan sosial oleh pemerintah khususnya pada Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi
2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Peran Aparat Desa dalam Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19”.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata-I (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian merupakan garis besar penyusunan penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah memahami secara keseluruhan isi dari penelitian ini. adapun sistematika penulisan penelitian mengenai Peran Aparat Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dalam Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19”.

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian. Kemudian bab ini membahas tentang perumusan masalah sebagai faktor dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil penelitian yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Kegunaan penelitian yaitu menjelaskan manfaat teoritis dan praktis yang berguna bagi peneliti, pembaca dan instansi terkait. Sistematika yang digunakan untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui isi dari penelitian ini

secara keseluruhan. Serta kerangka teoritis mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian.

Bab II Kerangka Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori yang di gunakan dalam penelitian untuk menjawab problematika dalam penelitian. Kerangka pemikiran menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan teori yang relevan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan asumsi penelitian sementara.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, metode yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan teknik-teknik tertentu serta pengumpulan data atau bukti untuk dianalisis mengenai Peran Aparat Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dalam Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19”.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang analisis dari hasil pengelolaan data dan pembahasan mengenai Peran Aparat Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dalam Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak Covid-19”.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir yang memuat penjelasan mengenai kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya peneliti memberikan saran berupa tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap kebijakan yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis. Saran praktis biasanya lebih operasional sedangkan pada aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan atau teori.

Pada bagian akhir dilampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran

